



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 172.1.1/6 TAHUN 2020

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEBUMEN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen harus melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2019 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut diterima;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen telah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2019, dan hasilnya berupa rekomendasi kepada Bupati Kebumen untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan ke depan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Memperhatikan : Rapat Badan Anggaran pada tanggal 16 April 2020 membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Kebumen sebagai tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU agar dipergunakan sebagai pedoman untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan ke depan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 April 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,

SARIMUN

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen.

Nomor : 172.1.1/6 TAHUN 2020.

Tanggal : 23 April 2020.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Kebumen sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

Merujuk pada data LKPJ 2019, dapat dipahami secara umum, bahwa capaian pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sepanjang Tahun 2019 paling tidak sudah memberikan signal positif tentang capaian kinerjanya atau dengan kata lain telah memberikan trend kemajuan pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Namun secara khusus ada hal-hal tertentu yang harus dikoreksi secara jujur dan terbuka. Hal itu bisa dilihat dari Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, dari yang ditetapkan sebanyak 26 IKU, diketahui bahwa 20 (dua puluh) indikator sasaran atau 76,92% pencapaiannya dengan kriteria Sangat Baik, 5 (lima) indikator sasaran atau 19,23% pencapaiannya dengan kriteria Baik, dan 1 (satu) indikator sasaran atau 3,85% pencapaian dengan kriteria Kurang Baik, dilihat dari sisi tercapai dan tidak tercapai diketahui bahwa ada 20 (dua puluh) IKU tercapai dan ada 5 (lima) IKU tidak tercapai

Untuk itu sudah sepatutnya dilakukan evaluasi secara serius dan mendalam oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang gagal tersebut agar dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Selain itu DPRD Kabupaten Kebumen juga merekomendasikan agar penyajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) di waktu mendatang dilakukan dengan sistematika dan narasi yang jelas terutama dalam penyajian data target serta Indikator Kinerja yang tercapai dan tidak tercapai, semuanya harus dilaporkan dengan jujur, data yang detail dan obyektif sesuai realitas yang ada sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang bias bagi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kebumen, yang mengakibatkan pengukuran kinerja dan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan justru sulit dilakukan karena alat ukurnya tidak jelas. Selain itu rumus penentuan indikator kinerja juga diharapkan mengakomodasi variable – variable lokal di Kabupaten Kebumen secara linier untuk mengurangi kekeliruan dalam penyusunan target kebijakan pembangunan dan disparitas dalam pengukuran kinerja.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kebumen juga mengapresiasi keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana yang dilaporkan dalam LKPJ Bupati Tahun 2019 berupa pencapaian prosentase indikator kinerja yang telah ditetapkan, namun Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kebumen mengingatkan agar pencapaian prosentase indikator kinerja yang tinggi prosentasenya tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Kami mengajak untuk seluruh penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Kebumen untuk melangkah

ke tingkatan yang lebih maju, dengan mendasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan tidak semata-mata dari pencapaian indikator kinerja, namun juga mengukur keberhasilan kinerja melalui *output* dan *outcome* dari program dan kegiatan tersebut, sehingga keberhasilan yang kita capai dalam pembangunan tidak bersifat semu yaitu berupa angka-angka statistik saja namun juga ada hasil keluaran dan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat Kabupaten Kebumen terhadap pembangunan tersebut. Apabila tahapan ini telah dilakukan maka penilaian kinerja yang sesungguhnya bukan lagi dari DPRD namun justru berasal dari hati masyarakat Kabupaten Kebumen sendiri yang tercermin dalam nilai Survey Kepuasan Publik yang tinggi terhadap Pemerintah Kabupaten Kebumen.

B. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pendapatan Daerah

Bahwa realisasi dari Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2019 mencapai 100,53% dari target yang telah ditetapkan, apabila dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi pendapatan asli daerah tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 16,22%. Meskipun demikian Dana Perimbangan masih merupakan faktor yang dominan dalam APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2019.

Rekomendasi :

- a. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kebumen, proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pengaruhnya belum signifikan dalam postur APBD oleh sebab itu DPRD merekomendasikan adanya strategi-strategi baru dalam upaya peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan seperti laba BUMD, Lain – lain pendapatan yang sah, Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sehingga secara bertahap proporsi Dana Perimbangan dapat mulai digantikan dengan sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- b. DPRD merekomendasikan dilakukannya sebuah kajian secara mendalam, cermat dan akurat tentang potensi daerah yang nantinya dapat dipergunakan sebagai landasan dalam perencanaan pendapatan daerah.
- c. DPRD merekomendasikan agar dilakukan optimalisasi dari retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan basis database wajib pajak bumi dan bangunan sebagaimana amanah Perda Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan

b. Belanja Daerah

Dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.3.001.516.790.000,00 adapun realisasi belanja sebesar Rp.2.802.259.715.780,00 atau sebesar 93,36%. Belanja daerah terdiri dari Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp. 1.094.559.633.945,00 yang digunakan untuk Belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal, sedangkan belanja tidak langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga terealisasi Rp. 1.707.700.081.835,00

Rekomendasi : Agar postur APBD ke depan untuk prosentase alokasi Belanja Modal untuk ditingkatkan

c. Pembiayaan Daerah

Dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019, diketahui bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 203.192.380.000,00. dengan realisasi sebesar Rp. 203.192.379.502,50 atau mencapai 100%. serta Pengeluaran Pembiayaan Sebesar Rp. 9.470.000.000,00 dengan realisasi Rp. 9.470.000.000,00 atau mencapai 100%.

Rekomendasi : tidak ada

2. Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen pada kurun waktu 2016-2018. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Kebumen mencapai 67,41 poin. Tahun 2017 meningkat menjadi 68,29 poin hingga tahun 2018, Capaian IPM Kabupaten Kebumen sampai dengan 68,80 poin, atau dengan kata lain menurut UNDP, status pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen berada pada kategori sedang.

Rekomendasi :

- a. DPRD Kabupaten Kebumen mengapresiasi nilai pencapaian IPM di Kabupaten Kebumen, namun hal ini menjadi bias karena dalam LKPJ Bupati Tahun 2019 narasi yang disampaikan hanya berupa pencapaiannya saja tanpa mencantumkan target yang ditetapkan sehingga pengukuran kinerja sulit dilakukan. Oleh sebab itu dalam penyajian LKPJ mendatang diharapkan mencantumkan target IPM yang akan dikejar dalam tahun tersebut.
- b. Nilai IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Meskipun capaian IPM Kabupaten Kebumen sudah mencapai level sedang namun masih dibawah level IPM Jawa Tengah dan Nasional, DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten melakukan upaya serius dan terintegrasi untuk meningkatkan indeks IPM minimal setara dengan IPM Jawa Tengah atau melampauinya bila memungkinkan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen, yang menunjukkan peningkatan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen sebesar 5,13%. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 5,52% atau naik 0,39%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2019, diperkirakan dapat tumbuh pada kisaran angka 5,73%.

Adapun penyebabnya adalah kelompok Pertumbuhan sektor Kategori A yang meliputi Pertanian, dan Kehutanan tumbuh dengan kontribusi rendah karena adanya perubahan musim/iklim yang sangat mempengaruhi produktivitasnya. Sektor perikanan tumbuh relatif tinggi, namun sektor ini memberikan kontribusi kecil atau hanya 0,55%. Selain itu pada sektor Pertambangan Dan Penggalian, Konstruksi, dan Real Estate mengalami trend penurunan pertumbuhan sejak tahun 2017. Pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan rendah, dikarenakan adanya persaingan ketat. Pertumbuhan rendah lainnya juga dialami dari sektor Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib dikarenakan menurunnya kemampuan fiskal pemerintah daerah dari tahun ke tahun.

Rekomendasi :

- a. DPRD Kabupaten Kebumen mengapresiasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berhasil di raih Kabupaten Kebumen namun di sisi lain juga prihatin karena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru Kabupaten Kebumen masuk dalam kategori Kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bersifat statistik saja, namun kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen rendah. Terlebih jika dikaitkan dengan angka kemiskinan maka terjadi fenomena anomali dimana pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi angka kemiskinan juga tinggi padahal seharusnya terjadi berkebalikan saat pertumbuhan ekonomi tinggi maka angka kemiskinan seharusnya rendah.
- b. Kontribusi sector pertanian yang rendah di Kabupaten Kebumen menunjukan skala petani di Kabupaten Kebumen dalam kategori petani tradisional yang salah satu ciri khasnya produktivitas pertaniannya sangat bergantung pada kondisi iklim/ musim/ cuaca. Oleh sebab itu DPRD merekomendasikan agar dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah untuk memodernisasi pertanian baik melalui program pelatihan, bantuan maupun kemitraan agar produktivitas petani meningkat dan konsisten sepanjang musim. Hal ini merupakan langkah penting untuk mengatasi angka kemiskinan karena wilayah kantong kemiskinan umumnya berada di pedesaan.
- c. Pada Sektor jasa keuangan yang rendah, DPRD mencermati hal tersebut bukan semata-mata terjadi karena persaingan yang ketat, namun justru terjadi karena daya beli masyarakat yang rendah akibat kemiskinan. Sudah menjadi pameo umum bahwa

orang miskin tidak menarik dijadikan ceruk pasar industri keuangan karena kemampuan keuangannya yang terbatas yang membuat resiko gagal bayar kredit perbankan menjadi tinggi.

- d. DPRD merekomendasikan agar perencanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen memasukan unsur konsumsi masyarakat sebagai parameter dalam indicator kinerja karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen saat ini sudah bergeser basisnya dengan berbasis konsumsi bukan industri, pertanian maupun pertambangan.

C. EVALUASI PENCAPAIAN 26 INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RPJMD 2016-2021

1) **Angka Harapan Lama Sekolah**

Bahwa maksud dari Indikator Angka Harapan Lama Sekolah ketika pada tahun 2016 ditetapkan 12,72 adalah bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,71 atau setara dengan Diploma I, diketahui bahwa pada tahun 2019 angka Harapan Lama Sekolah ditarget sebesar 12,87 tahun dalam laporan LKPJ disampaikan capaian kinerjanya sebesar 12,91 tahun yang artinya melampaui target dengan dukungan program-program untuk menjaga peluang anak usia 7 tahun bisa bersekolah atau menempuh pendidikan dengan harapan pemerintah sampai Diploma 1. Kalau kita hanya menghitung dari tahun 2016 tentunya indikator ini belum mencerminkan output maupun outcome apa yang sudah tercapai sehingga kami DPRD tidak bisa menilai indikator angka harapan lama sekolah ini kecuali didukung oleh data awal berapa jumlah anak usia 7 tahun pada tahun 2016, berapa anak usia 7 tahun pada tahun 2016 yang sekolah SD, berapa anak usia 7 tahun pada tahun 2016 yang dikategorikan anak dari keluarga tidak mampu

Rekomendasi :

- a. Agar ke depan Pemerintah Kabupaten bisa membuat data awal sebagaimana dimaksud DPRD diatas.
- b. Capaian dari Program yang mendukung Indikator ini untuk bisa disampaikan dalam LKPJ seperti berapa anak sekolah dikebumen yang menerima Program Indonesia Pintar, Berapa Keluarga Miskin yang menerima Beasiswa.
- c. Untuk Program Beasiswa Keluarga Miskin yang bersumber dari APBD agar lebih difokuskan dikantong-kantong kemiskinan.

2) **Rata-Rata Lama Sekolah**

Indikator Kinerja Utama ini menggambarkan rata-rata Penduduk Kebumen yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan berapa lama, ketika dalam RPJMD ditahun 2019 ditargetkan 7,20 tahun maka artinya bahwa pada tahun 2019 penduduk kebumen yang usianya diatas 25 tahun rata-rata telah menamatkan pendidikan minimal SD atau sederajat (ditempuh 6 tahun) dan rata-rata meneruskan ke jenjang sekolah berikutnya terealisasi 7,34 tahun atau mencapai target. IKU Rata-Rata Lama Sekolah tentunya berbanding lurus dengan Program Wajib Belajar

12 tahun atau menamatkan pendidikan SMA, DPRD menilai penentuan target terlalu rendah.

Rekomendasi :

- a. Target IKU Rata-Rata sekolah ini untuk lebih akseleratif dengan program wajib belajar 12 tahun. hal ini sangat terkait dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk, dengan pendidikan yang cukup diharapkan terbentuk angkatan kerja dengan kompetensi yang tinggi sehingga dapat diserap dunia kerja, setelah memiliki penghasilan maka akan berkontribusi mengurangi angka kemiskinan.
- b. Program Kegiatan Belajar Paket A, Paket B dan Paket C untuk lebih disosialisasikan lagi sehingga penduduk kebumen yang tidak masuk pendidikan formal/tidak meneruskan/putus sekolah bisa menyelesaikan jenjang pendidikan sesuai dengan umurnya

3) Presentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan

Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan pada tahun 2019, ditargetkan sebesar 59,55%, dan teralisasi 63,59% atau melampau target, akan tetapi capaian ini menggambarkan bahwa belum seluruhnya penduduk Kabupaten Kebumen memanfaatkan fasilitas pendidikan yang didukung layanan pendidikan dari sekolah yang berkualitas/terakreditasi A.

Rekomendasi : Pemerintah Kabupaten Kebumen harus melakukan pemerataan kualitas sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen agar tidak terjadi ketimpangan mutu lulusan dan kualitas antar wilayah

4) Capaian Prestasi Pemuda dan Olahraga

Capaian Prestasi Pemuda dan Olahraga pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 56,09%, dan teralisasi 102,77%, yang mana diketahui keberhasilan capaian indikator kinerja ini didukung dengan peningkatan jumlah cabang olahraga yang mendapatkan kejuaraan di tahun 2019 yakni sebanyak 35 cabang atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya terdapat 20 cabang olahraga yang mendapatkan kejuaraan dan juga adanya peningkatan jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan skala regional dan nasional yaitu sejumlah 1210 pemuda ditahun 2019 meningkat dibanding tahun 2018 yang hanya 586 pemuda atau meningkat 100% lebih, apresiasi terhadap capaian Prestasi Pemuda dan Olahraga ini yang tentunya membawa nama baik Kabupaten Kebumen di kancah regional maupun nasional akan tetapi dari segi penghargaan terhadap prestasi pemuda dan olahraga DPRD menilai belum sebanding

Rekomendasi : Pemerintah Kabupaten Kebumen harus lebih memperhatikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi baik dari segi pembinaan dan pengakuan sehingga jangan sampai ada semisal atlet berprestasi dibidang olahraga karena minimnya penghargaan dan pengakuan diambil oleh Kabupaten lain.

5) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 ditargetkan 72,93 tahun dan terealisasi 73,01 tahun, atau tercapai 100,24%, yang mana kita ketahui keberhasilan indikator kinerja ini dipengaruhi oleh indikator Angka Kecukupan Gizi, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan dan Angka Penemuan Penyakit Menular.

Rekomendasi : Agar ke depan dalam penyampaian indikator bisa menampilkan berapa jumlah penduduk kebumen diperiode laporan LKPJ ini yang umurnya diatas angka harapan hidup, agar bisa dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam periode laporan LKPJ yang memudahkan kami DPRD dalam menilai capaian kinerja.

6) Angka Kematian Ibu

Pada tahun 2019, jumlah Angka Kematian Ibu Kabupaten Kebumen lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2018, dimana terjadi penurunan kasus dari 10 kasus pada tahun 2018 menjadi 9 kasus di tahun 2019.

Rekomendasi : Agar dalam penyajian LKPJ dicantumkan target Jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) dalam RPJMD 2019 dan dibandingkan dengan pencapaiannya pada tahun 2019, karena DPRD berpendapat bahwa indikator kinerja AKI bukan dihitung dari jumlah angka AKI di 2019 dibandingkan 2018 namun dihitung dari target di RPJMD 2019 dibandingkan dengan pencapaiannya di tahun 2019 dan juga agar bisa disampaikan rencana apa yang akan dilakukan setelah mengetahui faktor penyebab kematian ibu dimaksud untuk meminimalisir angka kematian ibu.

7) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi tahun 2019 ditargetkan 10,9/1000 KH, terealisasi 6,8/1.000 KH, artinya selama tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kebumen berhasil menekan Angka Kematian Bayi dari target RPJMD untuk itu DPRD mengapresiasi atas capaian kinerja ini. Diketahui jumlah kematian bayi tercatat dalam laporan sebanyak 164 bayi yang meninggal yang disebabkan oleh beberapa hal.

Rekomendasi : Agar dalam penyajian LKPJ bisa dicantumkan berapa jumlah angka kelahiran bayi pada periode laporan LKPJ dikelompokkan ke dalam jenis tingkatan penduduk serta titik penyebarannya sehingga DPRD bisa menganalisa dan menilainya serta agar bisa dibuat rencana tindakan ke depan setelah mengetahui faktor penyebab kematian bayi.

8) Presentase Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah

Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai Kabupaten Beriman memiliki target agar semua siswa SD dan SMP yang lulus sekolah dapat membaca dan melek huruf Al-Quran. Dari total 41.899 siswa Jumlah Siswa SD dan SMP sederajat yang Lulus, yang sudah bisa membaca Al-quran berjumlah 41.866 siswa. Sehingga indikator kinerja ini berhasil dengan capaian kinerja 100%.

Kesimpulan bahwa persentase angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah di RPJMD tahun 2016-2021, data awal sudah 100% artinya pemerintah sudah yakin berapapun jumlah siswa yang lulus SD/ sederajat dan SMP/ sederajat pasti bisa baca Al Quran. DPRD mempunyai asumsi apakah paramaternya hanya cukup bisa baca Surat Al Fatihah atau surat-surat pendek. Kemudian apakah siswa-siswa tersebut sudah membaca dengan baik, dilihat dari mahroj hurufnya dan tajwidnya, DPRD berpendapat tidak semua siswa lulus dapat baca sesuai harapan kami, dan dengan 2 jam pelajaran agama per minggu sangatlah kurang dan walaupun bisa baca Al Quran secara baik dan benar bukan berarti ini atas kinerja pemerintah saja.

Rekomendasi : DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan agar indikator kinerja ini tidak digunakan lagi dalam RJMD mendatang dan diganti dengan IKU yang dapat mencerminkan filosofi Kebumen Beriman dan perhatian pemerintah kepada pihak-pihak yang bergerak di bidang pendidikan agama non sekolah harus diperhatikan.

9) Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan

Pada tahun 2019, terjadi penurunan kasus pelanggaran norma-norma keagamaan yang menjurus ke hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, dimana kasus pelanggaran ini dianggap dapat mengganggu stabilitas keamanan lingkungan dan kerukunan umat beragama. Dari target yang ditentukan sebesar 32,61% tercapai 32% atau dengan capaian kinerja mencapai 98%. Bahwa cakupan penanganan dalam IKU ini yaitu Rehabilitasi Kasus Narkoba, Penemuan Kasus Baru HIV dan Kasus Pertikaian Agama.

Rekomendasi : Agar dilakukan penjelasan lebih lanjut terkait Penemuan Kasus Baru HIV apakah semata-mata karena ada perilaku pendudukan yang melanggar norma-norma keagamaan yaitu perzinahan atau karena tertular sehingga bisa dilakukan antisipasi ke depan dan terkait dimungkinkan adanya tempat prostitusi untuk ditutup.

10) Penurunan Kasus Pelanggaran Hukum

Pada tahun 2019 kasus pelanggaran hukum yang terjadi di Kabupaten Kebumen semula ditargetkan hanya akan terjadi sebanyak 650 kasus, akan tetapi pada realisasinya hanya terjadi 634 kasus. Adapun pelanggaran hukum yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Perda yang paling banyak dilanggar adalah Perda No 2 tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ditangani sebanyak 353 kasus.

Terhadap IKU Penurunan Kasus Pelanggaran Hukum, Badan Anggaran berpendapat bahwa Bupati tidak dapat menjelaskan target 650 kasus apa saja yang diasumsikan akan dilanggar, boleh saja asumsi itu salah satunya Perda yang akan datang. Tapi sangat aneh jika kasusnya sampai 353 kasus apakah hanya untuk menunjukkan adanya kegiatan saja, ditambah lagi banyaknya kasus itu

disebabkan perbupnya turunnya setelah hampir 2 tahun setelah diundangkan.

Rekomendasi :

- a. Angka pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2018 yang tinggi sangat mungkin disebabkan beberapa faktor antara lain pemahaman pedagang kaki lima yang rendah terhadap regulasi tersebut dan sosialisasi yang minim oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen yang masih minim mengingat perda tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 sehingga belum lama penerapannya. Oleh sebab itu DPRD merekomendasikan dilakukan sosialisasi melalui pendekatan yang persuasif kepada masyarakat terhadap perda – perda Kabupaten Kebumen sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat meningkat, setelah itu baru dilakukan penegakan perda.
- b. Ke depan, IKU harus jelas, misalnya tahun 2020 targetnya 600 kasus, Bupati dapat membuat asumsi Perda apa saja yang kemungkinan akan dilanggar, sehingga dapat diantisipasi dari awal.

11) Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,94% pada akhir Tahun 2019, akan tetapi realisasinya diperkirakan 5,73. Indikator ini tercapai 94,11% atau kriteria capaian baik meskipun tidak mencapai target sebesar 6% sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Capaian ini tidak lepas dari peran/upaya kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan membuat rancangan atas kegiatan perekonomian yang menyesuaikan dengan iklim ekonomi internal, regional, nasional hingga global, serta merumuskan arah kebijakan perekonomian daerah.

Pada aspek lain muncul kerisauan dan pertanyaan, khususnya terkait dengan masalah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Terkesan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak parallel/tidak berdampak positif dalam upaya penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu dalam hal ini ada kesalahan konsep dan keterputusan antara pertumbuhan dengan serapan tenaga kerja itu sendiri. Pertanyaannya adalah dimana letak kesalahan itu atau tidak nyambungannya antara pertumbuhan ekonomi dengan serapan tenaga kerja? Seharusnya dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2019 sebesar 5,59%, Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah dapat menekan pertumbuhan pengangguran terbuka di Kabupaten Kebumen.

Rekomendasi :

- a. Penanganan dan penanggulangan issue-issue pengangguran, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen harus terus-menerus mengupayakan penciptaan lapangan kerja baru yang produktif padat karya dan banyak menyerap para pencari kerja baru.

Oleh karena itu, keterkaitan dengan sektor-sektor lain perlu dibangun sinergisitas yang terintegrasi, agar issue ini kedepan tidak lagi menjadi hal yang menakutkan tapi justru sudah terbangun solusi tepat bagi SDM yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen.

- b. Seyogyanya pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai harus terus ditingkatkan sesuai tuntutan jaman yang membutuhkan SDM handal dan terampil. SDM Kabupaten Kebumen punya peluang untuk merebut pangsa kerja yang lebih baik dan lebih luas.
- c. Agar memiliki program/kegiatan untuk memajukan pasar-pasar rakyat supaya pasar rakyat dapat menjadi sumber nafkah para pelaku UMKM dan pedagang kecil.

12) Pendapatan Perkapita Penduduk

PDRB per kapita Kabupaten Kebumen pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 22.447,540,00, adapun perkiraan realisasi mencapai Rp 23.156.270,00 yang sampai dengan saat ini masih dalam proses perhitungan BPS.

Rekomendasi : DPRD tetap meminta ke depan dalam penyampaian Indikator ini sudah mencantumkan perhitungan BPS terkait Pendapatan Perkapita Penduduk

13) Rasio/Indeks Gini

Indeks Gini Kabupaten Kebumen pada Tahun 2019 mencapai 0,22 yang jauh lebih rendah dari tingkat ketimpangan di level nasional yang mencapai skor 0,39. Capaian ini juga sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Capaian kinerja indikator rasio/ indeks gini telah mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja 100% dengan kriteria capaian kinerja Baik. Dengan adanya Indeks Gini yang rendah, diharapkan bahwa upaya-upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program pembangunan tidak berimbas kepada segelintir golongan, namun bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Meskipun tingkat ketimpangan kita lebih rendah dibandingkan nasional maupun provinsi, namun upaya-upaya pemerataan harus tetap dilakukan, minimal adalah untuk menjaga agar ketimpangan tidak semakin melebar.

Yang perlu dievaluasi sejauh mana usaha untuk menurunkan ketimpangan tersebut. Dari sisi kebijakan, wilayah mana yang dijadikan sasaran, dan berapa kegiatan termasuk anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi hal tersebut. Harus ada ukuran untuk menilai bahwa telah dilakukan intervensi secara memadai untuk menunjukkan adalah political will dari pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan pendapatan tersebut.

Rekomendasi :

- a. Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan (indeks gini) yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah menciptakan lapangan kerja bagi warga yang masih menganggur. Perlu dibuat perda perlindungan investasi daerah, dengan tujuan agar pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Kebumen

mengambil bahan dan tenaga kerja dari wilayah Kabupaten Kebumen, hal ini untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara sekaligus.

- b. Meningkatkan upah minimum Kabupaten agar pendapatan karyawan meningkat. Hal ini juga terkait dengan garis kemiskinan karena UMP di Kabupaten Kebumen masih tergolong rendah.

14) Terbangunnya Kawasan Pembangunan ekonomi

Kawasan Pembangunan ekonomi pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 4 kawasan, namun terealisasi menjadi 5 kawasan. Keseluruhannya meliputi 5 (lima) kawasan pedesaan yaitu kawasan pantai pesisir, kawasan anyaman pandan, kawasan batik, kawasan peternakan sapi terpadu dan kawasan gula semut. Target akhir RPJMD 2016-2019 adalah 6 (enam) kawasan yaitu terbentuknya kawasan industri, target kawasan industri pada tahun 2019 adalah sampai tahap kegiatan koordinasi dengan KPKNL dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan kementerian ATR atau dengan porsi 20% atau kalau dihitung dari awal adalah sebesar 60% (10% tahun 2016, 20% tahun 2017, 10% tahun 2018 dan 20% tahun 2019) dari total 100% di akhir RPJMD 2016-2021, dengan asumsi output kinerja tahun 2019 adalah terbitnya izin Hak Pengolahan Lahan (HPL) akan tetapi ini akan terealisasi pada triwulan ke dua tahun 2020 dengan kata lain target kinerja tidak tercapai

Rekomendasi : DPRD merekomendasikan agar segera menyelesaikan tahapan tahun ke 4 yaitu koordinasi dengan KPKNL dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan kementerian ATR untuk mendapatkan izin HPL.

15) Persentase Peningkatan Investasi PMA/PMDN

Perkembangan realisasi investasi penanaman modal tahun 2019 mencapai Rp.887.522.601.767,-. Adapun Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN Pada tahun 2019 mencapai 181,88% dari tahun 2018. Dengan telah diresmikannya Mal Pelayanan Publik, kami berharap kemudahan dalam mengurus ijin investasi di Kabupaten Kebumen.

Rekomendasi :

- a. Kami mengapresiasi atas pelaksanaan Mall Pelayanan Publik, namun masih perlu dilakukan penyederhanaan lagi tentang persyaratan dan penyederhanaan SOP. Sehingga diharapkan mampu menarik investasi di Kabupaten Kebumen.
- b. Keberadaan Mall Pelayanan Publik belum bisa sepenuhnya digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen karena keberadaan Mall Pelayanan Publik belum masuk renstra Pemerintah Kabupaten Kebumen sehingga belum bisa dikategorikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). DPRD merekomendasikan agar pengukuran tingkat pelayanan publik justru harus diukur dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik, dan hal ini juga merupakan amanat Perda Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen yang sudah di sahkan.

16) Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata

Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisata ditargetkan hingga 17,90%, dan terealisasi 44,86%. Adanya kenaikan jumlah kunjungan wisatawan diketahui bahwa disebabkan karena adanya event-event yang dilaksanakan yang mendatangkan potensi wisata domestik serta aksesibilitas infrastruktur menuju tempat-tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah/swasta/Desa mengalami peningkatan yang dilaksanakan oleh daerah tahun 2019 berdasarkan rapat pembahasan dengan OPD prosentase sebesar 44,86% adalah akumulasi penjumlahan kunjungan ke obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah dan yang dikelola oleh Desa atau Pokdarwis

Rekomendasi :

- a. agar dalam penyajian LKPJ mencantumkan jumlah wisatawan yang berkunjung tidak hanya menyajikan prosentase saja sehingga dapat dilakukan penilaian yang obyektif atas pencapaian IKU OPD tahun 2019 tidak membandingkan pencapaian IKU OPD tahun 2018, artinya target yang ingin dicapai berapa jumlah wisatawan yang berkunjung
- b. Meskipun prosentase jumlah wisata meningkat tajam namun di sisi lain target perolehan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata pada tahun 2019 tidak tercapai. Seharusnya jumlah wisatawan yang berkunjung linier dengan jumlah pendapatan dari sector wisata. Oleh sebab itu DPRD Kabupaten merekomendasikan agar dalam penyajian data wisatawan dalam LKPJ dilakukan terpisah antara wisatawan yang mengunjungi obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan Obyek wisata yang dikelola oleh swasta sehingga jelas dalam pengukuran kinerjanya.
- c. Ke depan data-data yang disajikan terutama terkait dengan target dan capainnya harus riil dan obyektif, selain itu harus pula ada inovasi-inovasi yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menggenjot pendapatan daerah dari sektor pariwisata ini.
- d. Pembangunan kepariwisataan harus fokus untuk mewujudkan Kebumen sebagai tujuan wisata yang berkelanjutan, jika perlu dapat melibatkan konsultan pariwisata yang handal.

17) Persentase Tingkat Pelayanan Infrastruktur Wilayah

Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah di Kabupaten Kebumen meliputi Prosentase capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, Prosentase capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik, Prosentase capaian cakupan pelayanan air bersih, serta Prosentase capaian jaringan rumah tangga berlistrik. Pada tahun 2019 dari target 59,43% yang ditetapkan Terealisasi 74,33%.

DPRD Kabupaten menilai rumus penentuan indikator kinerja utama pelayanan infrastruktur masih kurang tepat dan obyektif memperlihatkan realitas yang ada karena hanya melihat parameter empat hal yaitu panjang jalan, jaringan irigasi, pelayanan air bersih dan jaringan rumah berlistrik. Dalam LKPJ Bupati Tahun 2019

belum mencantumkan data awal empat parameter diatas sehingga menyulitkan dalam pengukuran kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen belum berbasis database sehingga terjadi disparitas hasil pembangunan dan pengukuran kinerjanya.

Metode untuk menghitung prosentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah sebagaimana tercantum pada halaman 156 sangatlah tidak rasional ketika dihitung penjumlahan antara indikator dibagi jumlah indikator, seharusnya masing-masing indikator prosentasenya dibuat berbeda, tidak dipukul rata, selain itu harus pula mampu menampilkan data masing-masing indikator, tidak hanya persentasenya. Kami mencermati bahwa IKU persentase tingkat layanan infrastruktur wilayah jika dihitung dengan metode yang benar tidak mencapai 74,33%.

Rekomendasi : Merekomendasikan agar metode untuk menghitung prosentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah dirubah serta memasukan parameter baru sebagai variable penyusun IKU Pelayanan Infrastruktur ditambah yaitu capaian kondisi jembatan dikabupaten kebumen

18) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian IKLH Kabupaten Kebumen tahun 2019, dari target 74,75 point terealisasi 75,89 point, atau dengan kategori baik. Indikator Kinerja ini menggunakan 2 (dua) parameter yaitu Angka Indeks Kualitas Udara dan Angka Indeks Kualitas Air, terkait sudah tidak dimasukkannya angka indeks tutupan vegetasi karena sudah menjadi urusan propinsi akan tetapi dampak riilnya tetap berpengaruh terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kebumen

Rekomendasi :

- a. Agar dicari pengganti angka indeks tutupan vegetasi untuk menghitung IKLH yang benar-benar mencerminkan kondisi lingkungan saat itu.
- b. Agar Program yang terkait dengan konservasi lingkungan harus ditingkatkan dari hulu sampai dengan hilir sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

19) Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 cenderung menurun. Selama kurun 2016-2019, tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen menurun dari 19,26% menjadi 16,82% atau telah mencapai target RPJMD sebesar 16,98%. DPRD Kabupaten Kebumen berpendapat bahwa data kemiskinan Kabupaten Kebumen validitasnya rendah dan tidak mencerminkan kondisi riil kemiskinan yang ada. Hal ini yang menyebabkan semua program pengentasan kemiskinan tidak efisien, salah sasaran dan bahkan gagal

Rekomendasi :

- a. Perlu dibentuk sebuah pokja untuk mengevaluasi dan menyusun data kemiskinan yang valid, lengkap dan komprehensif sesuai kondisi kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

- b. Untuk mengakselerasi penurunan angka kemiskinan, diharapkan segera membentuk Panja Kemiskinan, membuat peta sebaran rumah tangga miskin (RTM) dan agar pelaksanaan pengentasan kemiskinan harus terintegrasi, berkelanjutan dan satu kendali.

20) Angka Pengangguran

Pada tahun 2019 angka pengangguran di Kabupaten Kebumen ditargetkan hingga 2,01%, namun terealisasi 5,52%. Hal ini tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018, angka pengangguran turun sebesar 0,06%. Secara umum penyebab naiknya angka pengangguran disebabkan karena selama kurun waktu 2016-2018 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja namun tidak diimbangi oleh daya serap/lapangan pekerjaan yang memadai.

Rekomendasi : agar IKU angka pengangguran direview kembali parameternya karena berbanding terbalik dengan indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen. Secara teori ilmu ekonomi makro, masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang.

21) Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik

Pada indikator ini mencapai target dari 81,41% terealisasi 82,74% atau capaian kinerja 100,95%, dikarenakan kondisi gedung sekolah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembelajaran maka pembangunan maupun rehab sekolah harus tetap menjadi prioritas utama.

Rekomendasi : agar pelaksanaan pembangunan maupun rehab gedung sekolah diprioritaskan didaerah kantong kemiskinan dan di sekolah yang belum terakreditasi A serta peningkatan Alokasi Anggaran untuk sekolah swasta dan sederajat

22) Persentase Tingkat Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2019. Tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan ditargetkan sebesar 99% dan teralisasi 100%. Tolok ukur ini dilihat dari tingkat ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, tingkat pelayanan kegawatdaruratan dan tingkat mutu pelayanan kesehatan pada Puskesmas yang telah menerapkan manajemen kesehatan atau akreditasi.

Rekomendasi : agar penyampaian IKU ini juga dijelaskan prosentase masing-masing tolak ukur itu berapa dalam menyumbang target kinerja dan metode pengukuran indikator kinerja menggunakan rumus seperti apa sehingga kami DPRD dapat menganalisa dan menilai kinerja yang sudah dilaksanakan.

23) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Sesuai hasil evaluasi sementara oleh Tim EKPPD Provinsi Jawa Tengah, nilai EKPPD Kabupaten Kebumen tahun 2018 mencapai 3,3198 atau Kategori Sangat Tinggi akan tetapi dalam penyampaian LKPJ juga ditemukan hal-hal yang menghambat dalam pencapaian target antara lain kurangnya komitmen pimpinan OPD dalam mencermati dan mengevaluasi data kinerja OPD

Rekomendasi : Bupati untuk melakukan pembinaan terhadap pimpinan OPD yang kurang komitmennya dalam mencermati dan mengevaluasi data kinerja OPD

24) Nilai Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2018, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen memperoleh nilai 61,85 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah menunjukkan hasil yang baik. Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kebumen dari tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan perkembangan positif berdasarkan penilaian SAKIP. Dalam Penyajian LKPJ disampaikan masih ada kendala untuk mencapai nilai akuntabilitas kinerja namun tidak dijelaskan kendalanya apa.

Rekomendasi : agar kedepan dalam penyajian IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja disampaikan kendala itu apa saja dan penyebabnya apa sehingga DPRD dapat menganalisa dan menilai sehingga kami DPRD dapat memberikan masukan-masukan

25) Opini BPK atas LKPD

Bahwa target kinerja yang ingin dicapai di tahun 2019 adalah indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD 2018 terealisasi WTP yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD 2018 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan tercapai target yang dimaksud, untuk itu DPRD mengapresiasi atas capaian tersebut serta terhadap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas LKP Tahun 2018 yang sudah ditindaklanjuti. Dalam Pencapaian ini masih banyak kendala-kendala sebagaimana tercatat dalam LKPJ Tahun 2019.

Rekomendasi :

- a. Agar pengurus barang atau asset diberi pelatihan yang cukup dan dilakukan kaderisasi sejak awal sehingga ketika Pengurus Barang pensiun sudah ada pengganti yang cakap
- b. Bahwa dalam LKPJ Tahun 2019 indikator kinerja Opini BPK atas LKPD yang dihitung adalah LKPD Tahun 2018 bukan LKPD Tahun 2019, untuk itu dalam LKPJ ini agar Pemerintah Kabupaten memberikan informasi awal sejauh mana LKPD tahun 2019 diperiksa oleh BPK dan prediksinya apa.

26) Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ

Target kinerja yang ditentukan pada Tahun 2019 adalah 60% dengan terealisasi 70% atau mencapai target dengan nilai interpretasi tinggi, dengan semakin meningkatnya jumlah presentase PNS dan Pegawai BUMD dalam menyalurkan zakatnya maka akan semakin meningkatkan jumlah sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui BAZ. Untuk capaian tersebut DPRD mengapresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen

Rekomendasi : agar dalam penyajian IKU ini bisa menyajikan peta sebaran penyaluran zakat di masing-masing OPD dan BUMD

D. REKOMENDASI DPRD KABUPATEN KEBUMEN ATAS CAPAIAN KINERJA URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019

1) Urusan Pendidikan

Melalui pelaksanaan 6 program prioritas dan 24 Kegiatan capaian realisasi 95,70%. Dari 12 indikator target kinerja yang ditetapkan, 11 indikator kinerja telah mencapai target, satu indikator yang capaian kinerjanya 99% dari target yang ditetapkan yaitu persentase Gedung PAUD sederajat dalam kondisi baik, namun setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif.

Rekomendasi :

- a. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pendidikan ini adalah rendahnya mutu dan relevansi pendidikan yang dipengaruhi oleh Makin banyaknya guru PNS yang pension dan digantikan oleh Guru Tidak Tetap yang memiliki penghasilan dibawah UMK, masih kurangnya pelatihan untuk peningkatan kompetensi yang berbasis perkembangan ilmu dan teknologi terkini, sehingga perlu dilakukan adanya terobosan dalam peningkatan kompetensi Guru dan sarana Pendidikan yang melibatkan pihak ketiga, serta perlu dilakukan pembenahan terhadap penghasilan Guru Tidak Tetap.
- b. Program Wajib Belajar ditujukan kepada semua Warga Negara Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut masyarakat dapat menimba ilmu pada Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang merupakan wujud tanggungjawab Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu perlu juga adanya peningkatan mutu tutor Pendidikan Luar Sekolah sehingga perlu adanya dukungan anggaran dari Pemerintah.

2) Urusan Kesehatan

Dari 9 Indikator kinerja yang telah ditetapkan, 8 target kinerja telah tercapai, sementara satu indikator kinerja mencapai 85% dari target, yaitu Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan.

Rekomendasi : Dinas Kesehatan harus lebih intensif melakukan monitoring dan supervisi untuk meningkatkan kinerja serta mengoptimalkan kapitasi di Puskesmas, serta pencairan klaim dana JKN Non Kapitasi yang lebih tepat waktu.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dari 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat satu indikator capaian kinerja yang mencapai 430% yaitu cakupan pelayanan air bersih dari target 15,54% terealisasi 66,75%, sementara dua indikator lainnya yaitu capaian jalan kabupaten dalam kondisi baik 96% dari target yang ditetapkan sebesar 57,18% terealisasi 54,69% sedangkan capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 92% dari target yang ditetapkan sebesar 74,00% terealisasi 68,18%

Rekomendasi :

- a. Untuk penyajian cakupan pelayanan air bersih agar bisa menampilkan kondisi awal dari tahun 2015 jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih dan yang belum menggunakan air bersih itu berapa jiwa sampai dengan tahun 2019 sehingga DPRD mudah menganalisa dan menilai kinerjanya
- b. Terhadap anggaran untuk capaian indikator kinerja jalan kabupaten dalam kondisi baik agar ditingkatkan sehingga diakhir tahun RPJMD 2016-2021 bisa tercapai

4) Urusan Perumahan dan Permukiman

Dari 2 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu cakupan penanganan kawasan kumuh perkotaan dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 66,77% hanya tercapai 32,27% hal ini disebabkan minimnya anggaran yang dialokasikan di Tahun 2019 sedangkan cakupan jumlah rumah layak huni dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 100% terealisasi sebesar 98,04 mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian di tahun 2018. Dari kegiatan untuk capaian kinerja jumlah rumah layak huni dengan indikatornya adalah seberapa banyak jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang tertangani anggaran dialokasikan per unit masih sedikit yaitu Rp. 10.000.000,00 termasuk pajak-pajak sehingga ada kewajiban swadaya dari penerima yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin.

Rekomendasi : Untuk anggaran bantuan stimulant RTLH untuk tahun anggar 2020 DPRD merekomendasikan untuk dinaikan menjadi minimal Rp. 12.500.000,00 s.d maksimal Rp. 15.000.000,00 per Unit

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Melalui 9 program prioritas dengan 11 Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mencapai 2 (dua) indikator yaitu Penurunan Kasus pelanggaran Hukum dan Persentase Desa Siaga/Tangguh Bencana. Indikator kasus pelanggaran hukum di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah dari 529 kasus

pada tahun 2018 menjadi 634 kasus pada tahun 2019 sedangkan Persentase Desa Siaga/Tangguh Bencana mencapai target 100%

Rekomendasi : Agar penyajian Indikator Kasus pelanggaran Hukum disertai data Perda apa saja yang dilanggar dan berapa kasus.

6) Sosial

Capaian Penyelenggaraan urusan sosial dapat dilihat dari meningkatnya jumlah cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2019 ditargetkan 16,16% terealisasi 70,65%, atau mencapai 436,11% sedangkan pada tahun 2018 data capaian sebesar 67,25% terkait angka ini DPRD mempertanyakan kevalidan dan keakuratan data yang disampaikan

Rekomendasi : dilakukan pencermatan terhadap perhitungan capaian kinerja dan metode yang digunakan

E. CAPAIAN KINERJA DARI PELAKSANAAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Selanjutnya capaian kinerja dari pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :

1) Urusan Tenaga Kerja

Capaian kinerja urusan tenaga kerja dapat dilihat dari Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja dari target 21,09%, terealisasi 27,68%. Tercapainya kinerja tersebut didukung dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja, menghasilkan peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi, yang berdampak pada persentase penyerapan tenaga kerja di perusahaan baik dalam daerah maupun diluar daerah.

Rekomendasi :

- a. Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan diarahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta untuk meningkatkan kualitas SDM dan menciptakan fleksibilitas tenaga kerja.
- b. Banyaknya tenaga kerja yang tidak memenuhi kompetensi dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada, untuk itu diperlukan pembangunan ketenagakerjaan dalam berbagai bidang dengan memberikan pelatihan-pelatihan berbagai sektor, serta perbaikan sistem penggajian.
- c. dalam penyampaian LKPJ agar disebutkan berapa jumlah pengangguran, berapa jumlah tenaga kerja yang terserap/sudah bekerja.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan

Melalui pelaksanaan 3 Program Prioritas menghasilkan capaian indikator kinerja yaitu peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan, peningkatan jumlah organisasi yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan serta peningkatan jumlah organisasi perempuan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa, dari ketiga indikator tersebut kesemuanya mencapai target.

Rekomendasi : Gerakan PKK melalui 10 Program Pokok PKK untuk lebih ditingkatkan dan mendapat perhatian yang cukup dari Pemerintah Kabupaten termasuk kepada KPAD (Kelompok Pemerhati Anak Desa)

3) Urusan Pangan

Urusan ini dilaksanakan melalui 1 Program Prioritas dengan 11 Kegiatan telah menghasilkan capaian kinerja Persentase penanganan kerawanan pangan hingga 139,2%, persentase kelompok/gapoktan yang tertangani stabilitas harga pangannya mencapai 100%, serta Persentase kelompok wanita yang melaksanakan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan hingga 113,4%. artinya dari ketiga indikator tersebut mencapai target yang telah ditetapkan

Rekomendasi : Untuk pembentukan LPDM agar diprioritaskan di daerah-daerah kantong kemiskinan dan daerah-daerah rawan kekurangan pangan.

4) Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dicapai melalui 4 indikator kinerja diantaranya ; 1) Indeks Kualitas Udara mencapai 88,44 point, 2) Indeks Kualitas Air mencapai 63,33 Point, 3) Capaian luas RTH Perkotaan mencapai 63,33% dan 4) Cakupan Pelayanan Sampah mencapai 68,88%. Dari 4 indikator kinerja ada 2 yang tidak tercapai yaitu Indeks Kualitas Air yang tercapai hanya 88% dari target dan Capaian Luas RTH Perkotaan tercapai hanya 98,5% dari target yang dikarenakan kesulitan lahan diperkotaan

Rekomendasi : Agar dilakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap masyarakat dialiran sungai khususnya sungai Lukulo dan sungai Wawar dan sungai-sungai lainnya pada umumnya untuk berperilaku sehat serta selalu menjaga kualitas air sungai

5) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pendukung urusan administrasi dan catatan sipil sebanyak 1 program dengan 3 kegiatan prioritas telah menghasilkan capaian kinerja sebanyak 2 indikator yang meliputi cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran dan cakupan penerbitan kutipan akte kematian yang keseluruhan capaian kerjanya melebihi 100%. dari data yang disampaikan dalam LKPJ diketahui bahwa masih ada kelahiran-kelahiran yang tidak segera mengurus Akta Kelahiran

Rekomendasi : Pemerintah Kabupaten agar mencanangkan Program Pembuatan Akta Kelahiran Gratis untuk Masyarakat Kurang Mampu/Miskin serta sosialisasi akan pentingnya Akta Kelahiran bagi bayi yang lahir dikemudian hari.

6) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Urusan ini dilaksanakan melalui 6 program prioritas dan 7 kegiatan yang telah menghasilkan capaian kinerja Prosentase pembentukan Bumdes hingga 77,95% atau 350 desa, Prosentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan tentang pemerintahan desa sebesar 11,64% atau 979 orang dan Prosentase penanganan kasus penyelenggaraan pemerintahan desa hingga 100%. Dalam penyampaian LKPJ disampaikan ada kendala yaitu disebabkan oleh belum adanya regulasi kawasan yang menyebabkan program kawasan perdesaan belum terakses oleh Kemendes dan PDT

Rekomendasi : Pemerintah Kabupaten untuk segera membuat Perbup tentang Kawasan Perdesaan

7) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam pelaksanaannya urusan ini melalui 3 program yang menghasilkan capaian kinerja antara lain Peningkatan Pelayanan KB di Kecamatan, cakupan Peserta KB Aktif dan Jumlah Kelompok Pemberdayaan Kader Kelompok Tribini secara keseluruhan target tahun 2019 terpenuhi, walaupun capaian kinerja terpenuhi akan tetapi masih ada kendala-kendala antara lain kurangnya tenaga PLKB dan belum adanya produk hukum terkait dukungan anggaran terhadap kampung KB.

Rekomendasi : Pemerintah Kabupaten untuk segera membuat Perbup tentang Kampung KB.

8) Urusan Perhubungan

Capaian kinerja urusan perhubungan dapat dilihat dari peningkatan Cakupan Kualitas transportasi dimana target tahun 2019 sebesar 63,60% terealisasi 73,21%. Pencapaian kinerja ini didukung dengan 4 program prioritas dan 7 kegiatan dari 4 program tersebut kesemuanya mencapai target, ada kendala yang dihadapi terkait kegiatan dalam urusan perhubungan salah satunya adalah Angkutan Gratis.

Rekomendasi : terhadap kegiatan Angkutan Gratis DPRD Kabupaten Kebumen dengan menimbang beberapa hal dan kendala dilapangan merekomendasikan untuk ditiadakan dan ini sudah dilakukan di tahun anggaran 2020

9) Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika didukung melalui pelaksanaan 5 Program prioritas dan 7 kegiatan yang menghasilkan capaian indikator kinerja yaitu capaian layanan komunikasi dimana pada tahun 2019 ditarget sebesar 80,77% terealisasi sebesar 100%, walaupun melebihi target capaian akan tetapi masih ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi DPRD melihat ada 2 permasalahan yang penting untuk diperhatikan yaitu permasalahan SDM dan Keakuratan Kualitas Data dan Informasi Publik yang berbasis elektronik.

Rekomendasi : terhadap SDM pengelola urusan Komunikasi dan Informatika untuk diberikan pelatihan yang maksimal dan perlunya pengawasan terhadap kualitas data elektronik secara lebih mendalam.

10) Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Urusan KUMKM dilaksanakan melalui 4 Program Prioritas dan 8 Kegiatan dan telah diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Presentase Koperasi Aktif serta Peningkatan Jumlah UMKM, adapun realisasi masing-masing secara berturut turut 95% dan 102% dari Target yang ditetapkan di Tahun 2019

Rekomendasi : terhadap penyajian laporan terkait Prosentase Koperasi Aktif agar didukung data berapa jumlah koperasi pada saat periode laporan serta penyajian jumlah UMKM agar bisa dikelompokkan per jenis/bidang UMKM

11) Urusan Penanaman Modal

Urusan ini didukung dengan 1 program prioritas yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, adapun capaian kinerja yang dihasilkan adalah Peningkatan Nilai Investasi PMA/PMDN, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan Terpadu, serta Jumlah Usaha Perdagangan Berizin dari ketiga indikator tersebut semuanya mencapai target, terhadap telah beroperasinya Mall Pelayanan Publik DPRD mengapresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen dan juga terinformasi adanya Letter Of Intens (LOI) yang sudah ditandatangani oleh Bupati DPRD juga mengapresiasi.

Rekomendasi : terhadap Letter of Intens (LOI) yang sudah ditandatangani di Tahun 2019 seperti Rencana Investasi Industri Garmen di Kecamatan Alian dan Industri Peternakan di Kecamatan Pejagoan untuk bisa dikawal dan dilanjutkan untuk bisa terealisasi dengan tetap memegang aturan-aturan yang telah ditentukan

12) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan ini didukung melalui 4 Program prioritas yaitu 1) Program Peran Serta Kepemudaan, 2) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga, 3) Program Pembinaan dan Pemasyrakatan Olahraga, 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, dari 4 Program tersebut ada salah satu program dengan indikator Jumlah Pelatih yang dikirim mengikuti pelatihan tidak tercapai target. Namun ada yang menggembirakan terkait capaian prestasi pemuda dan olahraga yang mencapai sebesar 183% dari target yang ditetapkan

Rekomendasi :

- a. terhadap target yang tidak tercapai yaitu Jumlah Pelatih yang dikirim mengikuti pelatihan agar bisa dijelaskan disebabkan oleh apa
- b. DPRD merekomendasikan untuk adanya peningkatan nilai tali asih bagi atlet dan pelaku olahraga yang berprestasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

13) Urusan Statistik

Urusan Statistik ini didukung oleh 1 program prioritas yaitu Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dari target 62 terealisasi 105 dokumen data base perangkat daerah.

Rekomendasi : terhadap penyampaian Indikator Kinerja Urusan Statistik agar dapat menampilkan keseluruhan data base dan OPD mana yang bertanggungjawab sehingga kami DPRD bisa mengetahui dan menilai seberapa jauh fungsi data dimaksud.

14) Urusan Kebudayaan

Melalui pelaksanaan 1 Program Prioritas yaitu Program Pengelolaan Keragaman Budaya capaian kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari 4 (empat) capaian yaitu capaian penyelenggaraan festival seni budaya, capaian pelestarian benda, situs dan cagar budaya, capaian jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta capaian Jumlah Group Kesenian. Output yang diinginkan dari

capaian-capaian tersebut adalah memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda dan pelestarian kesenian asli daerah Kabupaten Kebumen. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 67,27% tercapai 76% atau melebihi target akan tetapi jika dilihat dari penyampaian jumlah group kesenian secara total bertambah namun ada 3 jenis group kesenian yang menurun jumlahnya yaitu Jam Janeng, Lengger dan Cepetan

Rekomendasi :

- a. terhadap penurunan Jumlah Group Kesenian Jam Janeng, Lengger dan Cepetan agar bisa disampaikan penyebabnya sehingga jangan sampai ditahun berikutnya akan terus mengalami penurunan
- b. DPRD merekomendasikan untuk tersedianya sebuah Museum

15) Urusan Perpustakaan

Melalui pelaksanaan 1 Program Prioritas yaitu Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk mencapai indikator capaian kinerja yang ditetapkan yaitu capaian kunjungan perpustakaan, adapun target Tahun 2019 sebesar 14,47% terealisasi 14,67% atau mencapai 101% dengan jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 142.833 orang dalam setahun

Rekomendasi : Dengan telah disetujuinya Perda Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Perpustakaan oleh DPRD pada Masa Sidang I di Tahun 2020 agar segera Bupati Kebumen menyiapkan Peraturan Bupati sebagai aturan turunan sebagai amanat Perda dimaksud.

16) Urusan Arsip

Urusan ini didukung dengan penyelenggaraan 1 Program yaitu Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, adapun realisasi capaian kinerjanya dapat dilihat dari Persentase jumlah Perangkat Daerah menerapkan arsip baku yang ditargetkan 36,02% dan terealisasi 100%. Pada tahun 2016, persentase OPD yang telah menerapkan arsip baku hanya 16,09% atau 84 OPD, Namun pada tahun 2019 OPD yang telah menerapkannya telah mencapai 188 OPD atau 36,02%.

Rekomendasi : Dengan telah disetujuinya Perda Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kearsipan oleh DPRD pada Masa Sidang I di Tahun 2020 agar segera Bupati Kebumen menyiapkan Peraturan Bupati sebagai aturan turunan sebagai amanat Perda dimaksud.

17) Urusan Pertanahan

Melalui pelaksanaan 1 program prioritas dan 1 kegiatan, capaian kinerja urusan pertanahan diarahkan untuk capaian pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Sampai dengan tahun 2019, tanah milik Pemerintah Daerah yang telah bersertifikat mencapai 52,98%, hal ini melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD dan RKPD yaitu 26,53% .

Rekomendasi : Pemerintah Daerah harus menginventarisir aset-aset daerah termasuk tanah negara yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen untuk dimanfaatkan, dikelola, dijaga, dan didokumentasikan, selain itu perlu disediakan regulasinya agar dapat menjadi potensi sumber pendapatan asli daerah.

F. CAPAIAN KINERJA URUSAN PILIHAN

Selanjutnya capaian kinerja urusan pilihan sebagai berikut :

1) **Urusan Kelautan dan Perikanan**

Urusan Kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui 5 Program Prioritas dan 12 kegiatan, keseluruhan program dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dengan target sasaran peningkatan pelayanan infrastruktur, peningkatan kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat serta peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam untuk capaian sasaran tersebut dapat dilaksanakan kegiatan dengan indikator antara lain produksi ikan baik tangkap atau budidaya, jumlah angka konsumsi ikan, pengetahuan teknis dan manajemen kelompok masyarakat pesisir dan jumlah pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan

Ada hal menarik yang mana sekarang di Kabupaten Kebumen yaitu Usaha garam rakyat yang tumbuh dan berkembang dimulai pada tahun 2018 dengan hasil yang signifikan mulai terlihat ditahun 2019, diketahui produksi garam di Kebumen sampai dengan tahun 2019 mencapai 53.724 kg yang dihasilkan oleh 12 kelompok garam dari 4 kecamatan yaitu Mirit, Ambal, Klirong dan Puring akan tetapi Usaha Garam Rakyat tersebut belum tercantum dalam Renstra Kabupaten Kebumen 2016 - 2021 sehingga tidak relevan untuk dihitung sebagai kinerja dalam LKPJ Kabupaten Kebumen Tahun 2019 untuk itu DPRD tetap mengapresiasi atas adanya usaha garam rakyat yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen

Rekomendasi :

- a. agar pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan saja sehingga hasil pengukuran kinerja lebih riil, terukur dan obyektif
- b. agar dilakukan identifikasi lahan atau tanah yang digunakan oleh kelompok untuk usaha garam untuk selanjutnya agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan

2) **Urusan Pariwisata**

Urusan ini diarahkan untuk mencapai 2 indikator kinerja. Realisasi dari kedua indikator kinerja menunjukkan perkembangan sangat positif dalam peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan hingga 138%. Sementara Lama tinggal wisatawan mencapai 206%. Apabila dilihat dari tahun 2018, jumlah kunjungan wisata naik 44,86%. Dari 9 Objek Wisata yang dikelola Pemda ada 5 objek wisata yang mengalami penurunan kunjungan di tahun 2019 jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu Goa Jatijajar, Pantai Logending, Pantai Petanahan, Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang.

Rekomendasi : Agar dilakukan evaluasi dan identifikasi faktor-faktor penyebab menurunnya jumlah kunjungan ke 5 (lima) objek wisata karena dari sektor ini yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan terkait penyebab penurunan jumlah kunjungan untuk disajikan dalam laporan

3) Urusan Pertanian

Urusan ini didukung 8 program yang diarahkan untuk mencapai 8 (delapan) indikator kinerja yaitu Produktivitas Padi, Produktivitas Jagung, Produktivitas Kedelai, Kenaikan Angka Nilai Tukar Petani, Produksi Kelapa, Produksi Tembakau, Produksi Daging dan Produksi Telur, dari delapan indikator kinerja 3 indikator kinerja tidak mencapai target yaitu Produktivitas Padi, Produktivitas Jagung dan Produktivitas Kedelai

Rekomendasi : Agar dilakukan evaluasi dan identifikasi faktor-faktor penyebab menurunnya Produktivitas Padi, Produktivitas Jagung dan Produktivitas Kedelai dan terkait penyebab penurunan jumlah produktifitas untuk disajikan dalam laporan

4) Urusan Transmigrasi

Dengan dukungan 1 Program Prioritas dan 1 Kegiatan, Urusan ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja Capaian Transmigrasi Umum dengan realisasi 100% atau sebanyak 10 KK yang terfasilitasi untuk melakukan transmigrasi

Rekomendasi : tidak ada

5) Urusan Perindustrian

Keberhasilan urusan perindustrian dilihat dari capaian Indikator kinerja yang terdiri dari 2 indikator yaitu terbangunnya kawasan industri dan meningkatnya jumlah industri kecil menengah. Melalui pelaksanaan 5 program prioritas dengan 6 kegiatan ada beberapa hal yang belum tercapai yaitu presentase usaha perdagangan berizin dari target 20,23% terealisasi 7,99%, Jumlah IKM yang menerapkan merek bagi produknya dari target 30 IKM terealisasi 21 IKM dan Jumlah IKM yang produknya berstandar SNI dari target 60 IKM hanya terealisasi 1 IKM

Rekomendasi :

- a. khusus untuk target jumlah IKM yang produknya berstandar SNI agar dievaluasi jangan terlalu banyak target yang ditetapkan
- b. Terkait Capaian terbangunnya Kawasan Industri yang mana target 20% di Tahun 2019 yang mana kami DPRD beranggapan bahwa 20% tersebut adalah sampai dengan terbitnya izin Hak Pengelolaan Lahan (HPL) akan tetapi sampai saat ini Pemkab belum menerima izin HPL dari Kementerian ATR sehingga penilaian terhadap kinerja ini belum mencapai target, DPRD merekomendasikan agar segera dilakukan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh RPJMD

6) **Urusan Perdagangan**

urusan ini didukung melalui pelaksanaan 3 Program prioritas dengan 10 kegiatan, realisasi capaian kinerja urusan perdagangan yang terdiri dari Persentase Pasar Tradisional dalam kondisi baik yang mencapai 113%, dan jumlah usaha perdagangan berijin mencapai 103%.

Rekomendasi : Agar Persentase Pasar Tradisional Dalam Kondisi Baik diimbangi dengan Kondisi Kebersihan Yang Baik serta Fasilitas Umum Yang Cukup seperti WC Umum dan Mushola

G. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Adapun Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan, Pengawasan Dan Fungsi Penunjang Lainnya, yaitu sebagai berikut :

1) **Perencanaan**

Melalui pelaksanaan 8 program prioritas dengan 21 kegiatan, fungsi penunjang perencanaan diarahkan untuk mencapai indikator kinerja Capaian Kinerja Program dari target 90% terealisasi 90% atau capaian kinerja mencapai 100%. Urusan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 13.683.878.000,00 dengan realisasi Rp.12.387.436.030,00 atau mencapai 90,52%, akan tetapi masih banyak ditemukannya permasalahan-permasalahan baik faktor internal maupun eksternal dan teridentifikasi 6 permasalahan sebagaimana tertuang dalam LKPJ Tahun 2019 (dalam dokumen tertulis 7), DPRD sepakat dengan permasalahan itu dan DPRD melihat ada permasalahan lain yang menurut kami sangat berpengaruh yaitu adanya kebijaksanaan atau peraturan dari Pemerintah Pusat yang diluar analisa dan ramalan perkembangan sebagaimana mestinya termasuk bergesernya beberapa kewenangan yang semula menjadi wewenang kabupaten berubah menjadi kewenangan propinsi atau pusat yang mana semuanya itu tentu akan merubah target dan sasaran perencanaan jangka pendek atau jangka menengah.

Rekomendasi :

- a. Bupati untuk merekrut dan menambah ASN yang kompeten dan professional di lingkup BP3AD
- b. Bupati untuk segera selesaikan kesamaan dan kesatuan data dalam pelbagai bidang.
- c. Segera selesaikan revisi Perda RTRW, Perda RDTR dan LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan)
- d. Bupati agar memberikan kepercayaan kepada BAP3DA secara penuh tanpa ada intervensi dari pihak manapun sehingga menjadi perangkat daerah penunjang yang profesional.

2) Keuangan

Pada urusan fungsi penunjang keuangan ini dilaksanakan oleh BPKAD dan Bappenda dengan dua Indikator Urusan Daerah yaitu peningkatan pengelolaan keuangan dan asset dan capaian peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, terkait capaian oleh BPKAD yaitu peningkatan pengelolaan keuangan dan asset dari target 92,50% terealisasi 93,60% sehingga capaiannya adalah sebesar 101% akan tetapi capaian peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh Bappenda ada yang tidak tercapai yaitu penerimaan retribusi daerah yang hanya tercapai 82,17% walaupun meningkat jika dibanding tahun 2018.

Rekomendasi :

- a. Segera revisi Perda yang mengatur tentang Retribusi Daerah yang sudah lama tidak mengalami penyesuaian.
- b. Masukkan variable tingkat kepatuhan membayar pajak tingkat desa kedalam penentuan alokasi anggaran, program atau kegiatan yang akan diterima oleh Desa

3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh BKPPD dilakukan dengan melalui 5 Program yang untuk mencapai Target Kinerja, dari 5 Program tersebut ada 3 Program yang tidak sesuai target yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dan Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS, ada 7 permasalahan yang disampaikan dalam LKPJ yang mana secara tidak langsung diakui oleh Pemerintah Kabupaten ada yang tidak sinkron atau sejalan dengan semangat Reformasi Birokasi, DPRD menitikberatkan pada persoalan Kompetensi PNS, Perilaku PNS dan Penempatan PNS

Rekomendasi :

- a. Agar dilakukan evaluasi terkait metode dan tempat pelatihan Pegawai.
- b. Maksimalkan Penegakan Disiplin kepada PNS, Instansi dan OPD secara massif dan terus menerus, berdayakan Satpol PP secara penuh.
- c. ke Depan agar dalam SOTK, bupati dan baperjakat betul-betul melihat kemampuan, kompetensi dan penempatan yang tepat (the right man of the right place)
- d. Masukkan variable tingkat kepatuhan membayar pajak tingkat desa kedalam penentuan alokasi anggaran, program atau kegiatan yang akan diterima oleh Desa

4) Pengawasan

Melalui pelaksanaan 2 program prioritas, capaian kinerja fungsi pengawasan mencapai 119,5% yang terdiri dari 4 indikator kinerja. Keempat indikator tersebut terdiri dari, Persentase LAKIP yang nilainya meningkat mencapai 173%, Persentase Perangkat Daerah yang tidak ada temuan penyimpangan keuangan dalam audit LKPD oleh BPK mencapai 103%, Persentase penyelesaian tindak

lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu mencapai 102%, serta Nilai Leveling APIP Kabupaten mencapai nilai 3.

Rekomendasi :

- a. Inspektorat, dengan tidak mengesampingkan tugas pemeriksaan inspektorat untuk mengedepankan fungsi Pembinaan. Hal ini dirasakan oleh SKPD, bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat sangatlah minim, jangan sampai terkesan tidak melakukan pembinaan tapi melakukan pemeriksaan atau bahkan menyalahkan.
- b. Bupati ke depan diharapkan memberikan ruang yang bebas intervensi untuk Inspektorat sehingga dapat bekerja secara profesional dan transparan.

5) Fungsi lainnya

Capaian Kinerja urusan penunjang fungsi lainnya terdapat 28 (dua puluh delapan) indikator antara lain prosentase BUMD berpredikat sehat, prosentase pelaksanaan sukses pemilu, capaian peningkatan kemudahan akses informasi hukum mencapai, capaian peningkatan pelayanan kecamatan, capaian peningkatan pelayanan kelurahan, namun ada indikator yang capaiannya menurun dari tahun 2018 walau memenuhi target yaitu Jumlah UMKM yang terfasilitasi mengikuti pameran dimana Tahun 2018 Capaiannya 35 UMKM sedangkan di Tahun 2019 capaiannya 30 UMKM

Rekomendasi : Agar ke depan UMKM yang terfasilitasi mengikuti Pameran dari segi target dan capaian dari tahun ke tahun meningkat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,

SARIMUN